



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# RENSTRA

## TAHUN 2021 - 2026





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berisi upaya-upaya membangun pembudayaan kegemaran membaca, peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan peningkatan layanan perpustakaan dan layanan kearsipan yang dijabarkan dalam bentuk sasaan strategis, program, kegiatan, indikator, dan target serta kerangka pendanaan yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang relevan, sehingga kandungan isinya bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Rokan Hilir secara umum. Eksistensi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menjawab problem permasalahan. Di samping itu Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Kepada semua pihak baik lembaga terkait, lembaga pendidikan, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat diharapkan saling bersinergi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan perpustakaan dan kearsipan guna tercapainya peningkatan budaya gemar membaca, peningkatan penyelenggaraan kearsipan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, baik kapasitas dan aksesbitas.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rokan Hilir Tahun 2021-2026, semoga dapat tercapai dan bermanfaat secara internal maupun semua pihak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wataala. Amin.

Kabupaten Rokan Hilir,

2023



**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**

**HJ. FATMAWATI, SKM., M. SI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680825 198803 2 002**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	28
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS DIPERSIP KAB. ROKAN HILIR .....</b>	<b>30</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	30
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	31
3.3. Penetapan Isu-Isu Strategis .....	58
3.4. Telaah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau .....	59
3.5. Telaah Renstra Perpustakaan Nasional RI dan ANRI .....	65
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>68</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	68
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....</b>	<b>125</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.2.1</b>	Jumlah Persentase Sumber Daya Manusia DISPERSIP ..... 14
<b>Tabel 2.2.2</b>	Jumlah SDM DISPERSIP ..... 15
<b>Tabel 2.2.3</b>	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Rokan Hilir 2016-2020 ..... 18
<b>Tabel 2.2.4</b>	Rekapitulasi Koleksi Buku Yang Tersedia Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir 2016-2020 ..... 20
<b>Tabel 2.2.5</b>	Rekapitulasi Perpustakaan Di Kabupaten Rokan Hilir 2016-2020 ..... 21
<b>Tabel T-C.23</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 24
<b>Tabel T-C.24</b>	Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah ..... 26
<b>Tabel 3.1</b>	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ..... 30
<b>Tabel 3.2.1</b>	Matrik Telaah Visi, Misi dan Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir ..... 35
<b>Tabel 3.2.2</b>	Matrik Misi dan Tujuan ..... 37
<b>Tabel 3.2.3</b>	Matrik Tujuan dan Sasaran ..... 38
<b>Tabel 3.2.4</b>	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 ..... 57
<b>Tabel 3.4</b>	Anggaran dan Realisasi Perurusan dan Non Urusan dan Persentase Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019 ..... 60
<b>Tabel T-C.25</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ..... 69
<b>Tabel T-C.26</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..... 73

<b>Tabel 5.1</b>	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026.....	76
<b>Tabel 6.1</b>	Pagu Anggaran 2022-2026 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hilir .....	79
<b>Tabel T-C.27</b>	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hilir.....	80
<b>Tabel 7.1.</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir .....	128
<b>Tabel T-C.28.</b>	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	129

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> Tahapan Penyusunan Rancangan Restra .....	5
<b>Gambar 2.2.</b> Jumlah Perpustakaan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 .....	18
<b>Gambar 5.1.</b> Tema Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah hal yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menata masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan berorientasi hasil sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerinthan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD). Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Renstra Perangkat Daerah disusun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Rokan

Hilir yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih, dan rancangan rencana teknokratik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*oppurtunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta bersifat indikatif. Rencana Strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan

Kearsipan. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Bupati Rokan Hilir.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian/Non Kementerian guna keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Proses pelaksanaan Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Perumusan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 – 2026 , merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan substansi Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disahkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir menjadi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil Keputusan Bupati tersebut menjadi pedoman dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021- 2026 disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana

Strategis periode sebelumnya. Evaluasi atas Rencana Strategis sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai konsep strategis kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

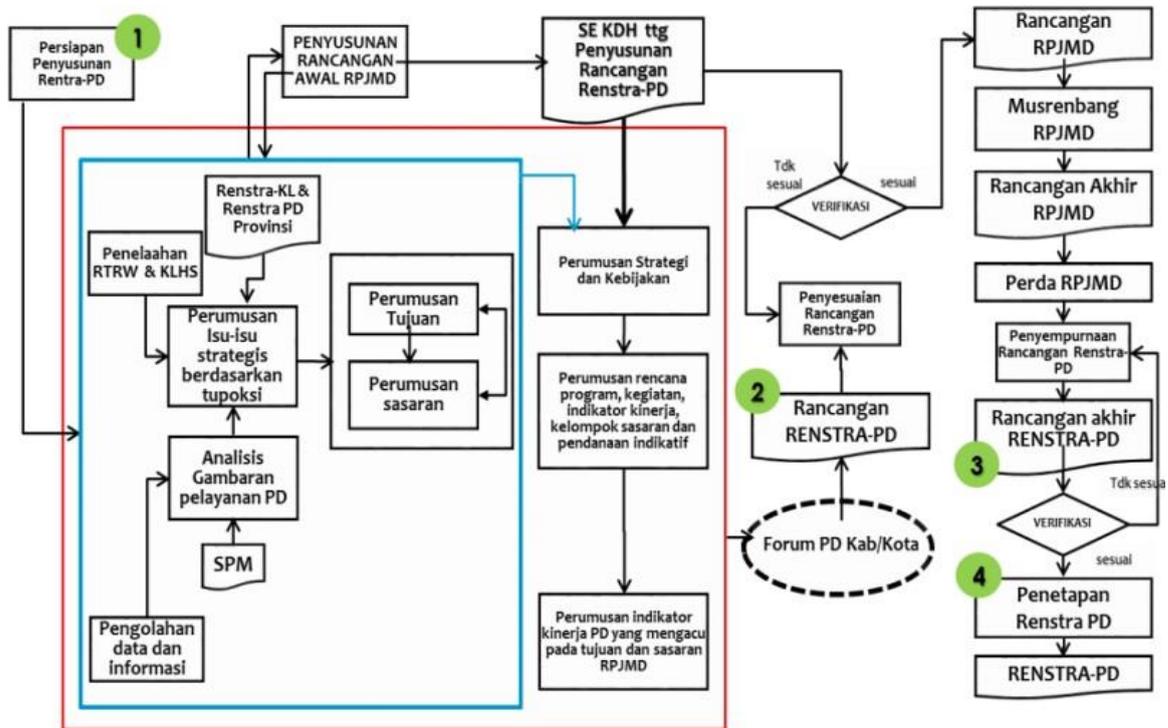
Tahapan teknis secara detail mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra



Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dimunculkan. Keterkaitan Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI adalah Renstra Kementerian membuat beberapa program secara nasional yang pelaksanaan di laksanakan oleh Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Perpustnas RI dan ANRI.

Hubungan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dengan Renstra Provinsi adalah sebagai pedoman dan menjadi perhatian dalam pembuatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir karena program yang ada di Renstra Provinsi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Daerah dalam hal ini Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir,

sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus sinergi dengan Renstra Provinsi. Sedangkan keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dengan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 disusun dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, dan Penjelasan Atas UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774.)
5. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 11);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2023.
  17. Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
  18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 26);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13).

20. Peraturan Bupati Nomor Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
3. Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021- 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Sebagai pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir terhadap pencapaian hasil yang diinginkan.
3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai

acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan.

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Rencana strategis K/L dan Rencana strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib kearsipan, lembaga harus mengakuisisi, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Di samping itu melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dengan kategori tipe B. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
  - f. Unit Pelaksanaan Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan
- (3) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. Sub Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
  - c. Sub Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (4) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
  - c. Sub Bidang Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca;
- (5) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Kearsipan; dan
  - c. Sub Bidang Pengelolaan Arsip;

## **2.1. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.**

### **2.1.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka organisasi harus

digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana. Secara umum jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tingkat pendidikan per 1 Maret 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Persentase Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 16 Februari 2021**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SMU Sederajat	9
4.	D II	1
5.	D III	
6.	S1	12
7.	S2	3
<b>J U M L A H</b>		<b>25</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian*

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki Pegawai yang berlatar belakang Pendidikan khusus Perpustakaan dan Kearsipan. Hal ini dapat menjadi latar belakang dalam perekrutan/penerimaan PNS (terkait pelayan publik). Berdasarkan jabatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki pegawai sejumlah 25 orang pada jabatan struktural serta 15 orang staf yang dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Jabatan Per 16 Februari 2021**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II	-	Kepala Dinas (Plt)
2.	Eselon III	4	Terdiri atas : 1 orang Sekretaris sekaligus Plt. Kadis dan 3 orang Kabid
3.	Eselon IV	6	
4.	Fungsional		
5.	Pelaksana	15	
6.	Cleaning Service	7	
7.	Penjaga Malam	2	
8.	Supir	1	
<b>J U M L A H</b>		<b>35</b>	

*Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian*

**2.1.2. Sarana dan Prasarana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir berlokasi di Jl. Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan dipertimbangkan dari segi akses yang sangat mudah dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan umum ataupun pribadi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki bangunan dengan 2 lantai sebagai gedung utama untuk aktivitas perkantoran dan juga sebagai perpustakaan daerah. Kondisi kedua gedung tersebut masih jauh dari standar perpustakaan dan kearsipan. Secara kepemilikan asset, gedung Perpustakaan saat ini merupakan gedung milik sendiri. Secara sarana, khususnya arsip belum memiliki gedung sendiri sebagai gedung depo arsip. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir .

Adapun sarana pendukung untuk kelancaran administrasi perkantoran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu :

Gedung yang dipergunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 1 buah dengan status hak milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Gedung ini dipergunakan untuk unit layanan perpustakaan daerah dan kegiatan administrasi Kepala Dinas, sekretariat dan 3 bidang. Kondisi gedung utama saat ini sudah baik namun relative sempit karena semakin banyaknya pegawai yang di tempatkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan ruang pelayanan perpustakaan yang bisa dibilang kurang memenuhi sebagai standar perpustakaan nasional.

Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk operasional terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4, yaitu :

- 1 unit mobil Nissan Frontier 2,5 M/T Pick-up Double Cabin tahun 2012 yang digunakan oleh Kepala Dinas dengan kondisi baik.
- 1 unit mobil Toyota Hilux tahun 2008 yang digunakan untuk operasional ke lapangan dengan kondisi baik.
- 1 unit mobil pustaka keliling yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dan 1 unit mobil pustaka keliling yang merupakan hibah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang dipergunakan untuk layanan pustaka keliling ke sekolah-sekolah dengan kondisi baik.

Mobiler berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet dan sejenisnya yang digunakan untuk pelayanan rutin administrasi perkantoran dan layanan unit perpustakaan umum daerah. Kondisinya beragam, secara umum dalam kondisi baik namun terdapat juga dalam kondisi rusak berat. Komputer dan perlengkapannya berupa PC, laptop, printer, scanner dan server yang digunakan sebagai sarana untuk mengolah data dan administrasi surat menyurat. Kondisi beragam mulai dari kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan.

#### **Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.**

Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pada pasal 80 dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah wilayahnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang No. 43 Tahun 2009 Pasal 80 sebagai Penyelenggara Kearsipan.

Untuk penyelenggaraan Kearsipan mengacu kepada Undang- Undang yang baru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Bab III Penyelenggaraan Kearsipan, Pasal 3 ayat (3) antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan kearsipan di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan tanggung jawab bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Rokan Hilir telah diterbitkan berbagai peraturan yang menyangkut masalah kearsipan antara lain:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Vital Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 34);
2. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 35);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Aktif Dan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 36).

Urusan Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam kelompok urusan wajib non pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya Urusan

Perpustakaan berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah. Perpustakaan Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini adalah jumlah perpustakaan.

**Gambar 2.2 : Jumlah Perpustakaan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017**



Sumber: BPS, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2018

Menurut data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan selama periode 2016-2020. Hal ini menandakan terjadi penurunan minat baca Masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Tahun 2016 jumlah yang berkunjung ke Perpustakaan sebanyak 2.383 kunjungan. Adapun jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 603.311 Jiwa. Sedangkan persentase pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 hanya 4,20 persen.

**Tabel 2.2.3 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Rokan Hilir 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2383	2055	1780	1099	791
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	603.311 Jiwa	-	-	-	-
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan.	4,20 %	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rohil 2020

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan pada jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah yaitu tahun 2016 sebanyak 2.383 judul buku, mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 1.099 judul buku. Adapun jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebanyak **790 judul**.

**Tabel 2.2.4 REKAPITULASI KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2020**

No.	KATEGORI	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KET
		EKS	JUDUL	EKS	JUDUL	EKS	JUDUL	EKS	JUDUL	EKS	JUDUL	
1	AGAMA	340	-	-	-	-	-	550	110	1.020	204	
2	ILMU PENGETAHUAN UMUM	139	-	-	-	-	-	275	55	905	181	
3	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN TEKNOLOGI	790	-	-	-	-	-	310	62	405	81	
4	ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	320	64	
5	KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	295	59	
6	PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	450	90	1.005	201	
7	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	400	80	-	-	
8	MATEMATIKA	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	FILSAFAT	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SAINS	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	REFRENSI	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH ...</b>		<b>2.371</b>	-	-	-	-	-	<b>1.985</b>	<b>397</b>	<b>3.950</b>	<b>790</b>	
<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN EKS...</b>												<b>8.306</b>
<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN JUDUL...</b>												<b>1.187</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rohil 2021

Jumlah rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2016-2020. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Rokan Hilir terus mengalami kenaikan yaitu Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, jumlah perpustakaan yang terdata yakni berjumlah 815 pustaka

**Tabel 2.2.5 REKAPITULASI PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR 2016-2020**

No.	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KET
1.	<b>PERPUSTAKAAN UMUM</b>						
	TINGKAT KABUPATEN	1	1	1	1	1	
	TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	41	41	41	42	51	
2.	<b>PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH</b>						
	TINGKAT SD/SEDERAJAT	767	767	767	767	82	
	TINGKAT SMP/SEDERAJAT					LAGI DIDATA	
	TINGKAT SMA/SEDERAJAT					LAGI DIDATA	
3.	<b>PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI</b>	3	3	3	3	3	
4.	<b>PERPUSTAKAAN KHUSUS</b>	2	2	2	2	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>815</b>	<b>139</b>	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rohil 2021

## 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah merupakan suatu komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dalam rencana strategis ini digambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada pagu anggaran tahun 2021. Dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip.

*(DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2021)*

Kegiatan pada setiap program meliputi :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatannya :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

## 2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatannya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

## 3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatannya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

Kinerja dari pelaksanaan ketiga program tersebut menjadi acuan dalam mengevaluasi penggunaan dan serapan anggaran dalam 5 tahun kedepan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir memiliki komitmen dalam mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan dalam 5 tahun kedepan. Adapun tingkat pencapaian program dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Pagu
3.627.743.138	3.400.477.079	227.266.059	93,74	6,26

### 2. Program Pembinaan Perpustakaan

Pagu APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Pagu
107.197.818	92.892.820	14.304.998	86,66	13,34

### 3. Program Pengelolaan Arsip

Pagu APBD Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi	Persentase Sisa Pagu
56.652.834	52.307.831	4.345.003	92,33	7,67

Alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD - Perubahan Tahun 2021 untuk melaksanakan 8 (Delapan) kegiatan.

**Belanja Langsung** di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar Rp. 838.632.580,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 739.627.668,- (atau sebesar 88,19% dari alokasi dana dan sisa sebesar Rp. 99.004.912 atau sebesar 11,81% dari alokasi dana.

**Belanja Tidak Langsung** alokasi dana sebesar Rp. 2.952.961.210,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.806.050.062,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,02% dari alokasi dana dan sisa sebesar Rp. 146.911.148,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 4,98% dari alokasi dana.

**Tabel 2.2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan pertahun	-	-	-	-	-	-	37%	-	-	-	-	37%	-	-	-	100%	
2	Nilai Indeks Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	D	-	-	-	100%	
3	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	-	-	-	CC	-	-	-		CC	-	-	-	100%	

**Keterangan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir tidak ada pencapaian Kinerja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir baru di bentuk Tahun 2020 sehingga tidak ada Renstra tahun sebelumnya.**

**Tabel 2.2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.627.743.138	-	-	-	-	3.400.477.079	-	-	-	-	93,74%	3.627.743.138	3.400.477.079
Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	107.197.818	-	-	-	-	92.892.820	-	-	-	-	86,66%	107.197.818	92.892.820
Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	56.652.834	-	-	-	-	52.307.831	-	-	-	-	92,33%	56.652.834	52.307.831

**Keterangan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir tidak ada Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah di karenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir baru di bentuk Tahun 2020 sehingga tidak ada Renstra tahun sebelumnya.**

Proses Perencanaan dilakukan terlebih dahulu melalui MUSRENBANG Desa, MUSRENBANG Kecamatan dilanjutkan dengan MUSRENBANG Kabupaten yang intinya dilakukan Pembahasan dengan Lembaga Legislatif guna memperoleh persetujuan setiap Program dan Kegiatan yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Panggar Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif yang telah disepakati bersama dan disetujui akan ditetapkan melalui keputusan Bupati Rokan Hilir sehingga Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan. Dalam Pelaksanaannya Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tetap mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal. Permasalahan Urusan Perpustakaan :

1. Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan desa yang mengikuti pelatihan/bimtek pengelolaan perpustakaan sehingga pemberdayaan perpustakaan desa belum optimal;
2. Belum memiliki Fungsional Pustakawan;
3. Kurang nya minat dan budaya baca di kalangan masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan promosi perpustakaan melalui pameran dan perpustakaan keliling.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai terutama dalam hal pembaharuan koleksi perpustakaan dan pemeliharaan peralatan pendukung maupun penunjang perpustakaan.
5. Berkurangnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan karena adanya wabah Covid-19.

Permasalahan Urusan Kearsipan:

1. Prasarana dan sarana kearsipan yang tersedia belum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) peraturan yang berlaku;
2. Perangkat Daerah belum melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang berkompeten di Lembaga Kearsipan di Kabupaten secara kuantitas dan kualitas terutama pengetahuan SDM terhadap pemanfaatan teknologi sebagai media menuju arsip digital.

4. Belum memiliki tenaga fungsional arsiparis Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan melalui bimtek, pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kualitas SDM yang berkompoten terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital.
2. Melaksanakan amanat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dengan membuat produk hukum daerah, surat edaran dan surat resmi yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan segala urusan perpustakaan dan kearsipan.
3. Konsultasi dan arahan serta petunjuk dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis kepada PNS sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing.
4. Melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Analisis terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Riau, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada Lima Tahun mendatang. Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*strengths*)**

- a. Sudah memiliki perpustakaan desa berjumlah 42 di setiap Desa.
- b. Sarana Gedung perpustakaan sudah milik sendiri.
- c. Dokumentasi tentang Film Putri Hijau, Panglima Layar.

- d. Bertambahnya Jumlah Perpustakaan pada perguruan Tinggi dan adanya beberapa penggiat literasi, perpustakaan Masjid serta Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat
- e. berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan kunjungan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.
- f. Jumlah Khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disemua sektor.
- g. Tersebarnya perpustakaan di kecamatan, desa, kelurahan dan perpustakaan keliling.

## **2. Kelemahan (*weaknesses*)**

- a. Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional
- b. Masih rendahnya minat baca kunjung masyarakat ke Perpustakaan
- c. Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca
- d. Kurang SDM Kearsipan dari kuantitas dan kualitas
- e. Belum maksimalnya arsip statis (bernilai sejarah).
- f. Belum adanya Jaringan Informasi Sistem Kearsipan belum terstruktur
- g. Belum lengkap adanya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang sesuai dengan standar tipologi. (Depo arsip, penyimpanan arsip belum memadai, arsiparis, tenaga pengelola pustakawan)
- h. Perpusatakaan baru punya 2 mobil perpustakaan keliling. (Provinsi, 1 Perpusnas)

## **3. Tantangan (*threats*)**

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar manusia.
- c. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dpandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Profesionalisme tenaga perpustakaa dan kearsipan masih rendah.

#### **4. Peluang (*opportunities*)**

- a. Besarnya komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
- c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
- d. Adanya Mobil Perpustakaan Keliling yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Desentralisasi dan otonomi daerah;
- f. Perkembangan teknologi;
- g. Keterbukaan informasi.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. Adapun identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya kemampuan literasi masyarakat	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya pembaharuan koleksi perpustakaan</li><li>• Kurangnya Pemeliharaan terhadap kelengkapan peralatan pendukung maupun penunjang perpustakaan</li></ul>
		Masih Rendahnya Kompetensi SDM Pengelola Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (capacity building)</li></ul>
		Masih Rendahnya Minat dan Budaya Baca di Kalangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya intensitas kerjasama kunjungan ke perpustakaan kepada lembaga/instansi</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sosialisasi dan promosi layanan perpustakaan</li></ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			melalui pameran dan layanan perpustakaan keliling
		Masih Rendahnya layanan digitalisasi perpustakaan dan pemanfaatan Informasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya inovasi layanan dan penggunaan informasi teknologi yang belum optimal</li> </ul>
2	Masih rendahnya kualitas pengawasan kearsipan	Belum Terpenuhinya Standar Kompetensi SDM Layanan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM secara berkala/periodik (capacity building)</li> </ul>
		Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan layanan informasi kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap penguatan kelembagaan kearsipan daerah</li> </ul>
		Masih rendahnya pemanfaatan informasi teknologi terhadap layanan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pengetahuan SDM terhadap pemanfaatan teknologi sebagai media menuju arsip digital</li> </ul>

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hilir ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan dalam masa pemilihan dan kampanye. Setiap organisasi pada prinsipnya mempunyai sebuah visi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi pada hakikatnya adalah apa yang organisasi inginkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dan juga memperhatikan visi RPJMN 2015-2019. Dengan demikian visi pembangunan 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS  
INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

---

<b>Maju</b>	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
-------------	--

---

<b>Religius</b>	Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
-----------------	---

---

<b>Berbudaya</b>	Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa
------------------	--

memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

---

**Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

---

**Perekonomian** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

---

### **Misi**

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

**2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

**3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir**

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

**4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan**

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi**

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban menjalankan misi ke 5 (lima). Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel 3.2.1 berikut :

**Tabel 3.2.1**

**Matrik Telaah Visi, Misi dan Program Pada  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

Visi :	<b>MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL</b>			
NO.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan ODP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi</b>			
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Koleksi Perpustakaan</li> <li>• Kurangnya Pemeliharaan terhadap kelengkapan peralatan pendukung maupun penunjang perpustakaan.</li> <li>• Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional.</li> <li>• Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca</li> </ul>	Banyaknya Pemustaka yang Membutuhkan Informasi di Perpustakaan
2	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan kapasitas belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran</li> </ul>	Komitmen kepala daerah yang tinggi dalam misi ke 2
3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Keterbatasan jaringan dan tenaga TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya anggaran dan kondisi jaringan yang terbatas</li> </ul>	Revolusi 4.0 menuntut pemerintah berbasis E-Gov

Visi :	<b>MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL</b>			
NO.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan ODP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dokumen arsip yang belum terdokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsip yang hilang dan belum terjaga dengan baik.</li> <li>• Pemeliharaan arsip yang ada belum maksimal karena kekurangan sarana dan prasarana</li> </ul>	Komitmen kepala daerah yang tinggi dalam misi ke 5
5	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pengadaan penambahan gedung pustaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan sumber daya anggaran.</li> </ul>	Komitmen kepala daerah yang tinggi dalam misi ke 5
6	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tempo perencanaan, penganggaran yang mundur dari jadwal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan anggaran di DPRD</li> </ul>	Komitmen Kepala Daerah yang tinggi
7	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Serapan anggaran setiap program belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya inisiatif dari bidang untuk memaksimalkan pagu anggaran yang disediakan</li> </ul>	Tingginya komitmen kepala daerah.
8	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah di lingkup DISPERSIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran pemeliharaan yang terbatas.</li> </ul>	ASN bisa memaksimalkan barang milik daerah yang sudah ada.

Visi :	<b>MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL</b>			
NO.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan ODP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengembangan kapastas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan kepegawaian masih minim.</li> <li>• Tingkat pendidikan pegawai perlu ditingkatkan.</li> </ul>	Peluang untuk tugas belajar terbuka dan peningkatan jabatan eselonisasi pegawai yang terbuka.

### 3.2. Penetapan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir ada beberapa hal yang dijadikan acuan antara lain :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Peraturan Bupati Nomor Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai organisasi pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir merasa puas atas pelayanan kepada pemustaka. Di dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan, namun berbagai upaya dilakukan dalam rangka pembenahan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadi sumber informasi, agen perubahan dan pusat peradaban.

3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga/OPD Provinsi. Dalam menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir, tentunya tidak lepas dari Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Renstra Perpusnas RI, ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menjadi acuan bagi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Sesuai Uraian tersebut di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemetaan kondisi perpustakaan lingkup Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapatkan prioritas agar dapat diketahui permasalahan dan solusi pengembangan perpustakaan tersebut.
- 2) Program budaya baca masyarakat Rokan Hilir. Rendahnya minat baca akibat dari persoalan literasi perlu segera dibangun melalui sinergi dengan institusi Pendidikan dan para penggiat literasi serta pemerhati pengembangan minat dan budaya baca
- 3) Peningkatan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- 4) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi baik dari segi portal web, sistem layanan dan partisipasi dalam media sosial.
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perpustakaan dan kearsipan
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pemustaka dan pengguna arsip.
- 7) Peningkatan penataan dan pengelolaan kearsipan secara professional.
- 8) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Depo Arsip sesuai standar tipologi.
- 9) Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan lingkup Pemerintah Daerah.

### 3.3. Telaah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama tahun 2019 (N-2) dan perkiraan target tahun 2020 (N-1).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau melaksanakan 10 Program yang mendukung operasional kantor dan melaksanakan kewenangan bidang perpustakaan dan kearsipan dengan Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat dari alokasi dan realisasi anggaran per program pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4.1**

**Anggaran dan Realisasi Per Urusan dan Non Urusan dan Persentase Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019**

NO	URAIAN	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN				FISIK
		ANGGARAN	BOBOT %	REALISASI	(%)	(%)
1.	5 Program untuk operasional	5.055.715.000	78,71	4.613.699.270	91,26	100

2.	2 Program bidang perustakaan	760.513.100	11,84	600.900.644	79,01	91,44
3.	3 Program bidang kearsipan	600.900.644	9,45	543.171.130	89,59	98
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>6.422.522.100</b>	<b>100</b>	<b>5.757.771.044</b>	<b>89,65</b>	<b>96,48</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau alokasi APBD Tahun Anggaran 2019,

- Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.422.522.100 realisasi Rp.5.757.771.044 (89,65%) tidak terserap Rp. 664.751.056 (10,35%)
- Alokasi anggaran urusan perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp. 1.366.807100,00 Realisasi sebesar Rp. 1.144.071.774,00 atau 83.70%, tidak tersesap Rp. 222.735.326 (16.30%)
- Sedangkan perbandingan bobot alokasi anggaran sebagai berikut :
  - a. untuk operasional kantor (non Urusan) sebesar Rp. 5.055.715.000 bobot (78,71) realisasi Rp. 4.613.699.270 (91,26%) tidak terserap Rp. 442.015.730 (8,74%)
  - b. untuk urusan kewenangan bidang perpustakaan sebesar Rp. 760.513.100 bobot (21,29) realisasi Rp. 600.900.644 (79,01%) tidak terserap Rp. 159.612.456 (16.30%).
  - c. untuk urusan kewenangan bidang kearsipan sebesar Rp. 606.294.000 bobot (21,29) realisasi Rp. 543.171.130 (89,59%) tidak terserap Rp. 63.122.870 (16.30%).
  - d. Dalam hal ini realisasi keuangan tidak mencapai 100%, disebabkan karena adanya sisa mati anggaran dari sisa kontrak, sisa at cost perjalanan dinas (akomodasi dan transportasi) dan adanya Barang Milik Daerah yang tidak terealisasi karena tidak masuk dalam rekap BMD Provinsi Riau Tahun 2019.
  - e. Dan realisasi fisiknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau secara keseluruhan sebesar 96,48%.

- f. Pagu anggaran Belanja Langsung akan mendukung kebijakan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang mengarah kepada pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan pengadaan literatur Perpustakaan sehingga diharapkan jumlah pengunjung ke Perpustakaan Soeman HS semakin meningkat, hal ini sejalan dengan mendukung misi ke-5 Gubernur Riau yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Pelayanan Prima Melalui Teknologi Informatika* dengan mencapai sumber daya manusia Riau yang berkualitas melalui Gerakan Riau Pintar.
- g. Dan dibidang kearsipan mendukung kebijakan pembinaan dan pelayanan arsip serta akuisisi dan penyimpanan arsip yang ditujukan kepada OPD, BUMD, partai politik/ormas, tokoh masyarakat. Pemerintah Kabupaten/kota, dan masyarakat untuk penilaian Indeks Manajemen Kearsipan yang dilakukan oleh ANRI.

Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dari kegiatan non urusan dan urusan yang menjadi sarannya dapat dilihat di bawah ini :

**I. Pelayanan Administrasi perkantoran.**

Kegiatan terdiri dari:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 3000 surat dan 1.500 materai.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 12 bulan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, 8 (delapan) unit.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, 12 Bulan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25 unit komputer, 3 mesin fotocopy
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, 12 bulan
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 12 bulan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 12 bulan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman, 8429 Porsi (1 tahun)
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, 67 Orang
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah 1 tahun

**II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan terdiri dari:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, 8 Unit.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, 2 Unit.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10 Ac, 2 genset, 2 lift, 2 pompa air, 54 toilet
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, 163 unit
5. Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT dan UPT Layanan Perpus akaan Soeman Hs 4 jenis
6. Pengamanan Aset Milik Daerah 1 Laporan

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan terdiri dari:

1. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 188 orang

**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan terdiri dari:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 orang
2. Publikasi Perpustakaan 1 kali pameran

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan terdiri dari:

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD 2 dokumen
2. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 1 dokumen
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD 28 laporan\

**VI. Program Pengembangan Perpustakaan**

Kegiatan terdiri dari:

1. Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) 1.000 eks
2. Penyusunan Ranperda Pengolahan dan Penyelenggaraan Perpustakaan 1

PERDA

3. Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra) 80.000 pengunjung
4. Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan 0 lembar
5. Pengolahan Koleksi Perpustakaan 2.000 eks
6. Penelusuran, Digitalisasi Bahan Perpustakaan (Centre of Excellence) Koleksi Budaya Lokal se-Sumatera 40 judul

**VII. Program Pembinaan Perpustakaan.**

Kegiatan terdiri dari:

1. Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling) 80 kunjungan
2. Peningkatan Kerjasama Perpustakaan yang di Akreditasi 12 kab/kota
3. Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan Sekolah se-Riau 40 orang

**VIII. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Kegiatan terdiri dari:

1. Pengolahan Arsip Inaktif (OPD) 5 OPD
2. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau 10 OPD
3. Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota 30 ASN
4. Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan 16 Sekolah
5. Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan 3 peraturan/keputusan Gubernur

**IX. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**

Kegiatan terdiri dari:

1. Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Sistem 1 Aplikasi
2. Pembuatan Dokumentasi Perpustakaan Kab/Kota 1 dokumen
3. Akuisisi arsip Daerah 30 berkas

**X. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan**

Kegiatan terdiri dari :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 2 ruang

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2019 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 yang akan diwujudkan dalam Tahun 2020 terdapat 4 (Empat) program dan Dua puluh empat (Dua puluh Empat) kegiatan.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator kinerja sasaran belum tercapai sepenuhnya dan perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan Capaian Kinerja belum dapat berhasil dilaksanakan 100 %.

Dalam dokumen Penetapan Kinerja pada tahun 2019 kegiatan yang termasuk dalam penetapan kinerja merupakan program kegiatan yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu:

- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku;
- Terwujudnya perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang sinkron, serasi dan sinergi;
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana, tatalaksana kerja, maupun teknis dan standar pelayanan aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau;
- Adanya sumberdaya manusia yang profesional dalam mengelola dan menganalisis data;
- Tersedianya sarana dan prasarana serta data dan informasi perpustakaan dan kearsipan;
- Tersedianya data/informasi hasil monitoring dan evaluasi.

#### **3.4. Telaah Renstra Perpustakaan Nasional RI dan ANRI**

Telaahan terhadap Renstra Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)

dan Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Visi dan Misi Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta Visi dan Misi Renstra Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) Tahun 2015-2019 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan”**. Dengan Tagline: **“INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019”**
- b. Misi Perpusnas RI Tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian terhadap Visi Perpustakaan Nasional, maka misi yang akan dicapai dalam masa waktu 2015- 2019 adalah sebagai berikut:
  1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir
  2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
  4. Mewujudkan Tenaga Perpustakaan yang kompeten dan profesional.
  5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
  6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.
- c. Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015-2019 adalah **“Arsip sebagai Pilar Good Governance Integrasi Memori Kolektif Bangsa”**. Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya bangsa, yang dapat menjalin dan mempersatukan keanekaragaman bangsa

dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d. Misi ANRI dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 ditempuh melalui 6 (enam), Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indicator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat control ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan(unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir fokus pada Misi Ke 5 dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dan realistis untuk setiap tahun

selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Oleh karena itu sasaran dari derivasi tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat
2	Meningkatkan penyelenggaraan daerah yang bersih,transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kearsipan Daerah. 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 pada bidang perpustakaan dan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja 2021	Target					Kondisi Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	- Jumlah rata-rata pemanfaatan kunjungan per hari ke perpustakaan daerah	n/a	20	25	30	35	40	40
			- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	791	642.782	674.921	708.688	744.122	781.328	781.328
2	Meningkatkan penyelenggaraan daerah yang bersih,transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	D	C	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	n/a	CC	CC	B	B	BB	BB

**Tabel 4.4 Indikator dan Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

NO	INDIKATOR	FORMULA	KETERANGAN
1	Jumlah rata-rata pemanfaatan kunjungan per hari ke perpustakaan daerah	$\frac{\text{Total jumlah pemanfaatan kunjungan ke perpustakaan daerah dalam 1 tahun}}{255 \text{ hari kerja}}$	-
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal bobot 60% + Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bobot 40%	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan
4	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 4.4 diatas terdapat beberapa indikator yang dilengkapi dengan formula yang digunakan untuk menghitung target dari indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, beberapa hal yang bisa digambarkan dari formula yang diatas yaitu :

1. Indikator pada Jumlah rata-rata pemanfaatan kunjungan per hari ke perpustakaan daerah dengan formula Total jumlah pemanfaatan kunjungan ke perpustakaan daerah dalam 1 tahun dibagi dengan 255 (merupakan estimasi hari kerja efektif selama 1 tahun). Total jumlah pemanfaatan kunjungan yaitu pemustaka memanfaatkan layanan perpustakaan yang ada di perpustakaan daerah seperti layanan perpustakaan keliling, pemanfaatan koleksi buku dan fasilitas yang tersedia diperpustakaan daerah.
2. Indikator pada Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dengan formula Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun, yaitu menghitung dan mendata jumlah pemustaka yang berkunjung pada seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan penggunaan aplikasi Google Form yang disebarakan kepada seluruh perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan sekolah.
3. Indikator pada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dengan formula Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal bobot 60% + Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bobot 40%. Formula ini digunakan untuk mengukur hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir melalui audit pengawasan kearsipan. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah provinsi tertuang di Pasal 8 pada PERKA ANRI Nomor 6 Tahun 2019. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan Internal yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah provinsi tertuang di Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 pada PERKA ANRI Nomor 6 Tahun 2019.
4. Indikator pada Nilai SAKIP OPD dengan formula Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat merupakan LHE AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah kabupaten Rokan Hilir sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama lima Tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan akan menentukan keberhasilan dari visi misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan komprehensif agar target pembangunan dapat terukur dan tepat sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, strategi merupakan sebuah pendekatan yang berupa gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah aktivitas. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir memerlukan strategi yang dapat menjelaskan Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. rumusan strategi harus Strategi berisikan program prioritas yang mampu menjamin keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sementara arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 disusun dan ditetapkan sebagai alat ukur bagi Pemerintah untuk menetapkan keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan dari visi misi tujuan dan strategi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 yang menjadi bagian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya berbasis infrastruktur dan Perekonomian yang Handal.			
MISI 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	Peningkatan Kualits Perpustakaan Daerah	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
		Peningkatan minat baca masyarakat	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten.
		Pengembangan koleksi buku dan khasanah budaya di Perpustakaan	2. Penambahan koleksi buku/bahan bacaan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.			
Meningkatnya Profesionalitas dan akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kearsipan Daerah	Peningkatan pengelolaan dan pengawasan kearsipan daerah	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
			3. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang

VISI : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya berbasis infrastruktur dan Perekonomian yang Handal.			
MISI 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
			4. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang
	Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggara Pemerintah	Peningkatan profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset
		Peningkatan nilai dan akuntabilitas dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD
			2. Meningkatkan profesionalisme ASN
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Meningkatkan kualitas pemenuhan Indikator Kinerja Kunci dalam LPPD
		Peningkatan e government dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah
			2. Meningkatkan Tata Laksana Pemerintahan
Peningkatan Profesionalitas ASN	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN		

Sumber : Hasil Analisis

Arah kebijakan yang disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dijadikan pedoman untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Setiap strategi memberikan arah yang jelas dalam pembangunan yang tepat sasaran. Rumusan arah kebijakan memberikan rasionalisasi pencapaian tujuan pembangunan agar tetap berjalan pada jalurnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD.

Setelah arah kebijakan disusun, maka prioritas pembangunan dipilih berdasarkan tahapan yang berbeda satu dengan lainnya. Tahapan tersebut dibagi untuk menciptakan kesinambungan dari arah kebijakan dengan menentukan jangka waktu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Arah kebijakan akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun juga memerlukan waktu lebih dari satu tahun bahkan berkelanjutan hingga 5 (lima) tahun. Agar tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka ditetapkanlah tema pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

2022 Tahun 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir</li> </ul>
2023 Tahun 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sumber daya manusia yang handal melalui pengembangan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan</li> </ul>
2024 Tahun 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</li> </ul>
2025 Tahun 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan sektor keunggulan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan saya saing daerah yang kompetitif</li> </ul>
2026 Tahun 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan Rokan Hilir Maju, Religius dan Berbudaya, dengan Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal</li> </ul>

**Gambar 5.1. Tema Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir**

**Tabel 5.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan					
Bidang	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	<p><b>Tema Pembangunan 2022:</b></p> <p>Mewujudkan aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir</p>	<p><b>Tema Pembangunan 2023:</b></p> <p>Meningkatkan sumber daya manusia yang handal melalui pengembangan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan</p>	<p><b>Tema Pembangunan 2024:</b></p> <p>Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik</p>	<p><b>Tema Pembangunan 2025:</b></p> <p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan sektor keunggulan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan daya saing daerah yang kompetitif</p>	<p><b>Tema Pembangunan 2026:</b></p> <p>Memantapkan Rokan Hilir Maju, Religius dan Berbudaya, dengan Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal</p>

Arah Kebijakan					
Bidang	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<b>Bidang Perpustakaan</b>	<b>Pemerataan dan Ketersediaan Perpustakaan berstandar nasional di setiap desa di Kabupaten Rokan Hilir</b>	Peningkatan Minat belajar dan membaca masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM yang handal di Kabupaten Rokan Hilir	Peningkatan layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi kepada Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.	Mencapai standar unggul kepastakaan di tingkat nasional.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas buku-buku perpustakaan di bidang keagamaan, budaya, teknologi informasi, sosial, dan ekonomi.
<b>Bidang Kearsipan</b>	<b>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tata Kelola Kerasipan yang baik di Kabupaten Rokan Hilir</b>	Kerasipan berbasis pada arsip statis (sejarah) untuk potensi wisata sejarah dan kolaborasi ilmiah dengan perguruan tinggi di Kabupaten Rokan Hilir	Ketersediaan layanan arsip bagi pemerintah dan masyarakat berbasis pada kekayaan arsip statis dan teknologi informasi.	Mencapai standar arsiparis di tingkat nasional.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas asip pemerintah dan arsip-arsip keagamaan, budaya, teknologi informasi, sosial, dan ekonomi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikasi rencana program prioritas yang disertai indikasi pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya akan dijabarkan melalui Rencana Strategis OPD. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Lima tahun kedepan ini, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan khususnya untuk membangun kawasan - kawasan sentra produksi dan industri di kabupaten Rokan hilir sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir mengantisipasi menurunnya sektor Migas.

Penyajian Kerangka Pendanaan Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021–2026 disajikan selanjutnya bersamaan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir disajikan Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyusunan Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijabarkan melalui indikasi program dan pagu indikatif berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ OPD/Bidang Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kondisi Kinerja awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Catan Pen ting
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/P agu Indikati f (RP)	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/P agu Indikati f (RP)	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/P agu Indikati f (RP)	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/P agu Indikati f (RP)	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.768.080.967		4.589.181.749		4.589.281.749		4.604.381.749		4.639.381.749	
		2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						140.000.000		630.000.000		630.000.000		635.000.000		635.000.000	
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				20%	40%	140.000.000	60%	530.000.000	80%	530.000.000	100%	535.000.000	100%	535.000.000	
		2.23.02.20.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terkelolaanya Perpustakaan yang ada di Kab. Rokan Hilir			20%	30%	70.000.000	40%	365.000.000	50%	365.000.000	60%	365.000.000	100%	365.000.000	

		2.23.02.20.1.01	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : information Technology Service Management )	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Layanan	1 Layanan	70.000.000	5 Layanan	70.000.000							
		2.23.02.20.1.02	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	30.000.000	1 Perpustakaan	30.000.000	1 Perpustakaan	30.000.000	4 Perpustakaan	30.000.000	
		2.23.02.20.1.03	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	Eksemplar	-	Eksemplar	40.000.000	Eksemplar	40.000.000	Eksemplar	40.000.000	Eksemplar	40.000.000	
		2.23.02.20.1.04	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	40.000.000	1 Perpustakaan	40.000.000	1 Perpustakaan	40.000.000	4 Perpustakaan	40.000.000	

		dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	a sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
	2.23.02.20.1.05	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	30.000.000	1 Perpustakaan	30.000.000	1 Perpustakaan	30.000.000	4 Perpustakaan	30.000.000	
	2.23.02.20.1.06	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	10 Orang	-	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	
	2.23.02.20.1.07	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Layanan	0 Layanan	-	0 Layanan	30.000.000							
	2.23.02.20.1.08	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	1000 Eksemplar	-	1000 Eksemplar	40.000.000	1000 Eksemplar	40.000.000	1000 Eksemplar	40.000.000	4000 Eksemplar	40.000.000	

		2.23.02.20.1.09	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	850 Eksemplar	-	850 Eksemplar	30.000.000	850 Eksemplar	30.000.000	850 Eksemplar	30.000.000	3400 Eksemplar	30.000.000	
		2.23.02.20.1.10	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	
		<b>2.23.02.20.2</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Indeks Minat Baca Masyarakat</b>		<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>170.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>	
		2.23.02.20.2.01	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Lokus	1 Lokus	70.000.000	1 Lokus	70.000.000	1 Lokus	70.000.000	1 Lokus	70.000.000	5 Lokus	70.000.000	
		2.23.02.20.2.02	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	20.000.000	1 Perpustakaan	20.000.000	1 Perpustakaan	20.000.000	4 Perpustakaan	20.000.000	

			ota	a												
		2.23.02.20.2.03	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	3 Orang	-	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	12 Orang	20.000.000
		2.23.02.20.2.04	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	35.000.000	1 Perpustakaan	35.000.000	1 Perpustakaan	40.000.000	4 Perpustakaan	40.000.000
		2.23.02.20.2.05	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	3 Orang	-	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	12 Orang	20.000.000
		<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh</b>		<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>55%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
		<b>2.23.03.20.1</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Tersedianya Naskah Kuno Milik Daerah yang di Lestarkan</b>		<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
		2.23.03.20.1.01	Jumlah Masyarakat yang Berperan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Dinas Perpustakaan dan	0 Orang	2 Orang	-	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	8 Orang	30.000.000

			Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kearsipan											
	2.23.03.20.1.02		Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	2 Eksemplar	-	2 Eksemplar	20.000.000	2 Eksemplar	20.000.000	2 Eksemplar	20.000.000	8 Eksemplar	20.000.000
	<b>2.23.03.20.2</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Naskah Budaya setiap Suku yang di Lestarikan</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
	2.23.03.20.2.01		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	0 Eksemplar	-	2 Eksemplar	30.000.000	2 Eksemplar	30.000.000	2 Eksemplar	30.000.000	8 Eksemplar	30.000.000
	2.23.03.20.2.02		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar	0 Eksemplar	-	2 Eksemplar	20.000.000	2 Eksemplar	20.000.000	2 Eksemplar	20.000.000	8 Eksemplar	20.000.000

2. Meningkatkan Profesionalitas dan kuantitas kinerja dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas pengawasan kearsipan daerah	<b>2.24.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>74.312.834</b>		<b>640.000.000</b>		<b>643.200.000</b>		<b>625.600.000</b>		<b>626.700.000</b>	
		<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>				<b>0%</b>	<b>73%</b>	<b>74.312.834</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	
		<b>2.24.02.20.1</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Unit Pengolah dan Unit Kerasipan yang dikelola dan ditata</b>			<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>74.312.834</b>	<b>45%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>55%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	
		2.24.02.20.1.01	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Berkas	40 Berkas	-	40 Berkas	50.000.000	40 Berkas	50.000.000	40 Berkas	50.000.000	120 Berkas	50.000.000		
		2.24.02.20.1.02	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Berkas	10 Berkas	74.312.834	10 Berkas	40.000.000	10 Berkas	40.000.000	10 Berkas	40.000.000	60 Berkas	40.000.000		
		2.24.02.20.1.03	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	48 Laporan	-	48 Laporan	40.000.000	48 Laporan	40.000.000	48 Laporan	40.000.000	192 Laporan	40.000.000		
		<b>2.24.02.20.2</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Unit Arsip statis daerah yang dikelola</b>			<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	

		2.24.02.20.2.01	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Arsip	1 Arsip	-	1 Arsip	40.000.000	1 Arsip	40.000.000	1 Arsip	40.000.000	4 Arsip	40.000.000	
		2.24.02.20.2.02	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Arsip	4 Arsip	-	5 Arsip	40.000.000	6 Arsip	40.000.000	6 Arsip	40.000.000	31 Arsip	40.000.000	
		<b>2.24.02.203</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerapan e-arsip Terintegrasi</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	
		2.24.02.203.01	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Pengguna	50 Pengguna	-	0 Pengguna	80.000.000	0 Pengguna	80.000.000	0 Pengguna	80.000.000	0 Pengguna	80.000.000	
		2.24.02.203.02	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	48 Laporan	-	48 Laporan	50.000.000	48 Laporan	35.000.000	48 Laporan	30.000.000	48 Laporan	30.000.000	

		2.24.02.203.06	Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Lembaga	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	20.000.000	1 lembaga	20.000.000	
		<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>			<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>259.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>262.200.000</b>	<b>80%</b>	<b>262.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>263.500.000</b>	
		2.24.03.20.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah		0%	0%	-	75%	41.000.000	75%	42.100.000	75%	42.200.000	100%	43.300.000	
		2.24.03.20.1.01	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2 Arsip	-	7 Arsip	21.800.000	3 Arsip	22.800.000	3 Arsip	22.800.000	8 Arsip	23.800.000	
		2.24.03.20.1.02	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2 Berkas	-	2 Berkas	19.200.000	2 Berkas	19.300.000	2 Berkas	19.400.000	8 Berkas	19.500.000	
		<b>2.24.03.20.2</b>	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat</b>	<b>Jumlah OPD yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip</b>		<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>	<b>93.800.000</b>	<b>75%</b>	<b>93.800.000</b>	<b>75%</b>	<b>93.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>93.900.000</b>	

		Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota																
		2.24.03.20.2.01	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	2 Arsip	55.000.000	2 Arsip	55.000.000	2 Arsip	55.000.000	4 Arsip	55.000.000		
		2.24.03.20.2.02	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	38.800.000	1 Arsip	38.800.000	1 Arsip	38.900.000	4 Arsip	38.900.000		
		<b>2.24.03.203</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Unit arsip yang bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan dimekarkan yang terselamatkan</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>	<b>42.200.000</b>	<b>75%</b>	<b>42.200.000</b>	<b>75%</b>	<b>42.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>42.200.000</b>	
		2.24.03.203.01	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3 Daftar	-	3 Daftar	11.000.000	3 Daftar	11.000.000	3 Daftar	11.000.000	12 Daftar	11.000.000		

			Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Daftar	Kabupaten/Kota												
		2.24.03.203.02	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3 Arsip	-	3 Arsip	10.000.000	3 Arsip	10.100.000	3 Arsip	10.100.000	12 Arsip	10.100.000
		2.24.03.203.03	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	11.000.000	1 Arsip	10.100.000	1 Arsip	10100000	4 Arsip	10100000
		2.24.03.203.04	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	10.000.000	1 Arsip	11.000.000	1 Arsip	11000000	4 Arsip	11000000
	2.24.03.204	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dialihmediakan			0%	0%	-	67%	21.100.000	67%	21.200.000	67%	21.100.000	85%	21.100.000

		2.24.03.204.01	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	2 Arsip	10.100.000	1 Arsip	10.100.000	1 Arsip	10.100.000	4 Arsip	10.100.000	
		2.24.03.204.02	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	11.000.000	1 Arsip	11.100.000	1 Arsip	11.000.000	4 Arsip	11.000.000	
		<b>2.24.03.205</b>	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten /Kota yang dinyatakan Hilang</b>	<b>Jumlah Kegiatan pencarian arsip statis Kabupaten</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>43%</b>	<b>61.100.000</b>	<b>43%</b>	<b>62.900.000</b>	<b>43%</b>	<b>63.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>63.000.000</b>	
		2.24.03.205.01	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	21.100.000	1 Arsip	21.100.000	1 Arsip	21.200.000	4 Arsip	21.200.000	
		2.24.03.205.02	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2 Arsip	-	3 Arsip	20.000.000	3 Arsip	21.000.000	3 Arsip	21.000.000	11 Arsip	21.000.000	
		2.24.03.205.03	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2 Arsip	-	3 Arsip	20.000.000	3 Arsip	20.800.000	3 Arsip	20.800.000	11 Arsip	20.800.000	

				dan Pengumuman												
		2.24.04	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>			0%	0%	-	100%	41.000.000	100%	41.000.000	100%	23.200.000	100%	23.200.000
		2.24.04.20.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi izin pengguna arsip yang dikeluarkan		0%	0%	-	100%	41.000.000	100%	41.000.000	100%	23.200.000	100%	23.200.000
		2.24.04.20.1.01	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 SOP	-	1 SOP	20.000.000	1 SOP	20.000.000	1 SOP	21.000.000	4 SOP	21.000.000
		2.24.04.20.1.02	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1 Arsip	-	1 Arsip	21.000.000	1 Arsip	21.000.000	1 Arsip	2.200.000	4 Arsip	2.200.000
2. Meningkatkan Profesionalitas dan akuntabilitas kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	2. Meningkatkan kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan	2.23.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	100%	3.768.080.967	100%	4.589.181.749	100%	4.589.281.749	100%	4.604.381.749	100%	4.639.381.749
		2.23.01.20.1.	Perencanaan, Penganggaran,	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57%	71%	60.000.000	100%	83.000.000	100%	83.000.000	100%	Rp 84.500.000	100%	119.500.000

			ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		2.23.01.20.1.01.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	50.000.000							
		2.23.01.20.1.02.	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	11.500.000	
		2.23.01.20.1.03.	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	10.000.000							
		2.23.01.20.1.04.	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	11.500.000	
		2.23.01.20.1.05.	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000							

		2.23.01.20.1.06.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000								
		2.23.01.20.1.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	11.500.000
		<b>2.23.01.20.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan ketersediaan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>38%</b>	<b>22%</b>	<b>3.003.921.210</b>	<b>22%</b>	<b>3.708.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>3.708.000.000</b>	<b>25%</b>	<b>3.711.500.000</b>	<b>25%</b>	<b>3.711.500.000</b>
		2.23.01.20.2.01	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	2.983.921.210	35 orang/bulan	3.650.000.000						
		2.23.01.20.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000
		2.23.01.20.2.03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000
		2.23.01.20.2.04	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000

			Akuntansi SKPD		an											
		2.23.01.20.2.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	11.500.000
		2.23.01.20.2.06	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	11.500.000
		2.23.01.20.2.07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	11.500.000
		2.23.01.20.2.08	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000
		<b>2.23.01.203</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>78%</b>	<b>350.000</b>	<b>78%</b>	<b>350.000</b>	<b>78%</b>	<b>Rp 350.000</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>

		Daerah														
		2.23.01.203.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000							
		2.23.01.203.02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000							
		2.23.01.203.03	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	50.000							
		2.23.01.203.04	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	50.000							
		2.23.01.203.05	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	50.000							
		2.23.01.203.06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	50.000							

		2.23.01.203.07	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000		
		<b>2.23.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>90.852.008</b>	<b>11%</b>	<b>147.422.000</b>	<b>11%</b>	<b>147.322.200</b>	<b>11%</b>	<b>Rp 157.422.000</b>	<b>11%</b>	<b>157.422.000</b>
		2.23.01.205.01	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit	35 Unit		35 Unit	35 Unit		35 Unit				
		2.23.01.205.02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35 Paket	35 Paket	30.852.008	35 Paket	37.222.000	35 Paket	37.222.000	35 Paket	37.222.000	35 Paket	37.222.000	
		2.23.01.205.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		2.23.01.205.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		2.23.01.205.05	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen		1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000		
		2.23.01.205.06	Jumlah Pegawai	Pemulangan Pegawai yang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	0 Orang	3 Orang	100.000	3 Orang	100.000	3 Orang	100.000	3 Orang	100.000		

			Pensiun yang Dipulangkan	Pensiun	akaan dan Kearsipan											
		2.23.01.205.07	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
		2.23.01.205.08	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang		
		2.23.01.205.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Orang	8 Orang	60.000.000	8 Orang	60.000.000	8 Orang	60.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	70.000.000
		2.23.01.205.10	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang		
		2.23.01.205.11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Orang	0 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	
		<b>2.23.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pemenuhan Administrasi Umum Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>80%</b>	<b>82%</b>	<b>284.737.597</b>	<b>82%</b>	<b>290.737.597</b>	<b>100%</b>	<b>290.737.597</b>	<b>100%</b>	<b>290.737.597</b>	<b>100%</b>	<b>290.737.597</b>
		2.23.01.206.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Dinas Perpustakaan	1 Paket	1 Paket	16.008.360	1 Paket	16.008.360	1 Paket	16.008.360	1 Paket	16.008.360	1 Paket	16.008.360

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dan Kearsipan												
	2.23.01.206.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	1 Paket	57.327.820									
	2.23.01.206.03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	1 Paket	15.580.046									
	2.23.01.206.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	1 Paket	26.560.375									
	2.23.01.206.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	1 Paket	34.175.078									
	2.23.01.206.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000									
	2.23.01.206.07	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	1 Paket	5.000.000									
	2.23.01.206.08	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-		1 Laporan	5.000.000							

					an												
		2.23.01.206.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	
		2.23.01.206.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.485.918	1 Dokumen	10.485.918	1 Dokumen	10.485.918	1 Dokumen	10.485.918	1 Dokumen	10.485.918	
		2.23.01.206.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	
		<b>2.23.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>18%</b>	<b>27%</b>	<b>-</b>	<b>36%</b>	<b>64%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
		2.23.01.207.01	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		
		2.23.01.207.02	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		

		2.23.01.207.03	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
		2.23.01.207.04	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit	
		2.23.01.207.05	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Unit	10 Unit		10 unit	5.000.000						
		2.23.01.207.06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18 Unit	4 Unit		4 unit	15.000.000						
		2.23.01.207.07	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		-		-		-		-	
		2.23.01.207.08	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		-		-		-		-	
		2.23.01.207.09	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
		2.23.01.207.10	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	

			Disediakan													
		2.23.01.207.11	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		10 unit	
		<b>2.23.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>226.744.152</b>	<b>100%</b>	<b>226.894.152</b>	<b>100%</b>	<b>226.994.152</b>	<b>100%</b>	<b>227.094.152</b>	<b>100%</b>	<b>227.094.152</b>	
		2.23.01.208.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	3.150.000	1 Laporan	3.300.000	1 Laporan	3.400.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000
		2.23.01.208.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	12 Laporan	50.594.152	12 Laporan	50.594.152	12 Laporan	50.594.152	12 Laporan	50.094.152	1 Laporan	50.094.152
		2.23.01.208.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000								
		2.23.01.208.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	12 Laporan	168.000.000	12 Laporan	168.000.000	12 Laporan	168.000.000	12 Laporan	169.000.000	12 Laporan	169.000.000

		2.23.01 .209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			25%	42%	50%	50%	92%	112.778 .000	100%	112.778 .000		
		2.23.01.209.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Unit	2 Unit	33.096.000	2 Unit	47.048.000	2 Unit	47.048.000	2 Unit	47.048.000	2 Unit	47.048.000
		2.23.01.209.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3Unit	3Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000
		2.23.01.209.03	Jumlah Jasa Pemeliharaan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit	
		2.23.01.209.04	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit	

		2.23.01.209.05	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Unit	3 Unit	5.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1.000.000	
		2.23.01.209.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Unit	5 Unit	8.730.000	8.730.000							
		2.23.01.209.07	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			
		2.23.01.209.08	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		-			
		2.23.01.209.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	1 Unit	40.000.000	40.000.000							
		2.23.01.209.10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.099.800	1 Unit	1.000.000	1.000.000	
		2.23.01.209.11	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			

		2.23.01.209.12	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Ha	0 Ha				0 Ha		0 Ha		0 Ha			
<b>Jumlah</b>								<b>3.982.3</b>		<b>5.859.1</b>		<b>5.862.4</b>		<b>5.864.9</b>		<b>5.901.0</b>		<b>81.749</b>
								<b>93.801</b>		<b>81.749</b>		<b>81.749</b>		<b>81.749</b>		<b>81.749</b>		<b>81.749</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021–2026 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masajabatan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021–2026 mengacu pada visi bupati terpilih yaitu **“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**. Berbasis pada fokus pembangunan infrastruktur dan perekonomian untuk memajukan Kabupaten Rokan Hilir dengan misi :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing, dengan berpedoman pada semangat dan nilai-nilai religiusitas
3. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
4. Memajukan sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif) yang terencana dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien berbasis teknologi

Penyusunan program kerja sebagai penjabaran visi dan misi bupati terpilih diterjemahkan ke dalam Sembilan program prioritas pembangunan Rokan Hilir (Nawa Bakti Rohil), untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada BAKTI ke 9 yaitu :

1. BAKTI 1. ROHIL MEMBANGUN Mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah ((jalan desa, jalan kecamatan dan antar

kecamatan, kabupaten dan jalan provinsi) dengan kebijakan anggaran yang cukup.

2. BAKTI 2. ROHIL CERDAS Mengejar ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, religius dan berbudaya melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas, serta pendirian Balai Latihan Kerja unggulan, untuk menyiapkan SDM terampil yang berdayasaing.
3. BAKTI 3. ROHIL BERKAH Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dengan mengembangkan potensi desa religi dan memakmurkan masjid/mushalla serta pemberian insentifbagi guru TPQ, TPA, MDA dan MDTA.
4. BAKTI 4. ROHIL HARMONI Menciptakan keharmonisan masyarakat dalam keragaman suku, adat istiadat, budaya dan agama melalui kajian dan penyelenggaraan event budaya adat istiadat.
5. BAKTI 5. ROHIL SEJAHTERA Mengejar ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup, dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas melalui program puskesmas unggulan disetiap kecamatan serta perbaikan layanan kesehatan di RSUD.
6. BAKTI 6. ROHIL BAHARI Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah dengan mendirikan Tempat Penjualan Ikan (TPI), serta memberikan bantuan sektor perikanan pada peternak ikan dan nelayan.
7. BAKTI 7. ROHIL BERDAYA Menangkap peluang ekspolrasi Migas dari Chevron ke Pertamina pada tahun 2021, dengan mendirikan BUMD yang bergerak dibidang perminyakan, serta mendirikan Balai Latihan Kerja Unggulan yang akan menyiapkan tenaga terampil di bidang perminyakan serta memberi kesempatan kepada kontraktorkontraktor atau pengusaha lokal di bidang migas. Memngkatkan peran korporasi dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui program CSR

8. BAKTI 8. ROHIL SWASEMBADA Memajukan sektor pertanian dan perternakan dengan menyediakan pupuk murah bagi petani, melalui program subsidi pupuk. Memberikan pelatihan dan pembinaan, serta bantuan permodalan dan pembangunan akses pasar bagi petani dan peternak
9. BAKTI 9. ROHIL AMANAH Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Memberikan pelayanan sistem administrasi kependudukan yang prima (KTP, KK, Akte kelahiran dua hari jadi) Mengembalikan eks pegawai honorer sebagai pegawai honorer daerah  
Memberikan kemudahan dalam layanan perizinan usaha.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dikumpulkan dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, prioritas penyusunan RPJMD pada 3 BAKTI yaitu BAKTI ROHIL MEMBANGUN pada pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah ((jalan desa, jalan kecamatan dan antar kecamatan, kabupaten dan jalan provinsi), BAKTI 2, ROHIL CERDAS pada pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas, dan BAKTI 5, ROHIL SEJAHTERA menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 dibawah ini:

**Tabel 7.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Kemampuan Literasi Masyarakat	- Jumlah rata-rata pemanfaatan kunjungan per hari ke perpustakaan daerah	$\frac{\text{Total jumlah pemanfaatan kunjungan ke perpustakaan daerah dalam 1 tahun}}{255 \text{ hari kerja}}$	n/a	20	25	30	35	40	40
			- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	791	642.782	674.921	708.688	744.122	781.328	781.328
2	Meningkatnya Profesionalitas dan akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal bobot 60% + Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bobot 40%	D	C	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya Kinerja Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	n/a	CC	CC	B	B	BB	BB

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C 28 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir periode 2021– 2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah rata-rata pemanfaatan kunjungan per hari ke perpustakaan daerah	n/a	20	25	30	35	40	40
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	791	642.782	674.921	708.688	744.122	781.328	781.328
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	D	C	CC	B	B	B	B
3	Nilai SAKIP OPD	n/a	CC	CC	B	B	BB	BB

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran sangat sentral dan strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 - 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten Rokan Hilir, RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Restra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021 – 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2021- 2026.

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**  
  
**Hj. FATMAWATI, SKM., M. Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19680825 198803 2 002**